



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**ROBERT SIHALOHO**

**1320922062**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**2016**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**ROBERT SIHALOHO**

**1320922062**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
2016**

## PERNYATAAN ORSINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Robert Sihaloho

NRP : 1320922062

Tanggal : 28 Januari 2016

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2016

Yang menyatakan,



*Robert Sihaloho*

(Robert Sihaloho)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robert Sihaloho  
NRP : 1320922062  
Tanggal : 28 Januari 2016  
Fakultas : Magister Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Padatanggal : 28 Januari 2016

Yang menyatakan,




Robert Sihaloho

## PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :  
Nama : ROBERT SIHALOHO, SH  
NRP : 1320922062  
Tanggal : 28 Januari 2016  
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana  
Judul Tesis :  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Ilmu Hukum Pidana, Program pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



DR. Erni Agustina, SH., Sp.N

Ketua Penguji



Pro. Dr. Indrati Rini, SH, MS

Penguji Ahli



Prof. Dr. Wahyono, SH., MS

Penguji I/Pembimbing



Dr. M. Ali Zaidan, SH., M. Hum

Penguji II/Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM

Direktur



DR. Erni Agustina, SH., Sp.N

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 28 Januari 2016

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Robert Sihaloho

## Abstrak

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat bahwa pentingnya perlindungan saksi, serta lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban ternyata belum sepenuhnya menjawab masalah perlindungan saksi itu sendiri. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang. Atas dasar pengamatan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian deskriptif analitis. Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata kunci:** Perlindungan saksi korban, system peradilan pidana.

# **LEGAL PROTECTION FOR WITNESSES VICTIMS IN THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE**

**Robert Sihaloho**

## **Abstract**

The research was done due to the objective reason of a special case of the importance of a witness protection program. Meanwhile, the establishment of witness and victim protection program hasn't solved the problems in the witness protection itself. The problem statements of the research are: How is the formulation of witness protection regulations in penal law process? How is the implementation of the policy of legal protection regulations in penal law process? And, how is the policy of the legal formulation of witness protection in the future penal law process. Based on the observation, a research was conducted using a descriptive, analytical method. The establishment of Witness and the Victim Protection Regulation is considered to be very important to protect their individual rights. The formulation of witness protection regulation is a phenomenon in the Indonesian criminal law procedure as the sub-system of penal law. The enforcement of this sub-system will always face the law enforcement officers. In the enforcement of witness protection law, it is found that the witnesses often are not under the protection. Even, they could turn to be the victims. That's why the formulation of the policy of witness protection program requires the harmony between the Penal Code and the Criminal Law Procedure. The witness and victim Protection laws are the magnum opus in the development of Indonesian Penal law. This law inspires the Indonesian Human Rights, especially, the witness and the victim rights in the penal law process. Thus, the witness protection program would become the standard procedures in the formulation of the Indonesian criminal law.

**Key words:** Witness protection, Criminal justice system

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tesis dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana dapat terselesaikan.

Studi ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana Hubungan kerjasama lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Penulisan tesis ini selanjutnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih derajat Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Hanya karena pertolongan Allah SWT dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen terutama dosen pembimbing, sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan.

Untuk itu, teriring do'a semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholeh, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menempuh studi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N. Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan dorongan serta kedisiplinan dan kejujuran ilmiah yang selalu dicontohkan.
3. Prof. Dr. Wahyono, SH., MH., yang ditengah kesibukan luar biasa, berkenan memberikan pencerahan, bimbingan, tuntutan dan arahan, dorongan serta teladan, melalui diskusi-diskusi kritis sejak dalam perkuliahan sampai pada proses bimbingan tesis.
4. Dr. M. Ali Zaidan, SH.MHum, dengan kepakaran dan integritasnya dalam pengembangan ilmu hukum telah membukakan pikiran dan wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.



5. Para Guru Besar dan Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya kepada penulis.
6. Kolonel Caj P.Silalahi, S.E, M.M. selaku kepala ajudan jenderal kostrad beserta seluruh staaf Ajudan Jenderal Kostrad, yang telah memberikan waktu, kepercayaan dan dukungan untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
7. Segenap pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. yang dengan penuh kesabaran membantu dan melayani penulis selama kuliah maupun penyelesaian tesis ini.
8. Ayahanda (Almr) Luddin Sihaloho dan Ibunda Genderia Sagala, yang telah mendidik, mengsuh dan mendoakan penulis, kepada Ayahanda mertua (almh) Japintar Siagian dan Ibunda mertua Rusliana Marpaung, terima kasih atas dorongan dan do'anya.
10. Istri tercinta Esra Juwita Siagian, S.E., yang dengan penuh cinta kasih dan ketulusan serta kesabaran mendampingi penulis, penuh pengertian, serta senantiasa memberikan semangat, dorongan do'a dan inspirasi kepada penulis. Teristimewa untuk anak-anakku : 1. Gabriel Imanuella Sihaloho, 2. Asnat Vanessa Sihaloho, dan 3. Sergio Kelsen Sihaloho, yang rela kehilangan waktu bercengkerama dan berkurang kasih sayang ayah.
11. Rekan-rekan Megister Hukum Angkatan IX, khususnya konsentrasi pidana yang telah saling memberikan dorongan dan pembelajaran di nkelas maupun diluar kelas.

Penulis menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam studi Sistem Peradilan Pidana.

Jakarta, Januari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAANPERSRTUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penulisan .....	8
I.4 Manfaat Penelitian .....	9
I.5 Kerangka Teori .....	9
I.6. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
II.1 Pengertian-Pengertian.....	16
II.2 Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi.....	18
II.3 Pengertian dan Proses Peradilan Pidana .....	22
II.4 Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	31
II.5 Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
III.1 Metode Pendekatan.....	52
III.2 Spesifikasi Penelitian.....	52
III.3 Jenis dan Sumber Data.....	52
III.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
III.5 Metode Analisa Data .....	53
BAB IV HUBUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN INSTANSI /LEMBAGA LAIN.....	54
IV.1 Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana .....	54
IV.3 Hubungan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) .....	75
BAB V PENUTUP .....	79
V.1 Kesimpulan .....	79
V.2 Saran-saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	